

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam Pembangunan Di Kelurahan Limbukan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh

* Zahratul Jannah¹, Ranggi Ade Febrian²

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

*Corresponding Author : zahratuljannah45@student.uir.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) dalam pembangunan di kelurahan Limbukan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori peranan menurut Soerjono Soekanto dengan tiga indikator utama yaitu norma, individu, dan individu dalam struktur sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LPMK sudah menjalankan perannya dengan baik sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menyusun dan mengawasi program pembangunan. Namun masih terdapat hambatan seperti keterbatasan anggaran operasional, kurangnya dukungan fasilitas penunjang kerja serta pengaruh norma sosial yang bersifat formal dan adat yang kadang membatasi ruang gerak LPMK.

Kata Kunci: Peran, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Kelurahan, Pembangunan

Abstract

This study aims to determine and analyze the role of the village community empowerment institution (LPMK) in development in Limbukan Village, South Payakumbuh District, Payakumbuh City. The method used in this study is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The theory used is the role theory according to Soerjono Soekanto with three main indicators norms, individuals, and individuals in the social structure. The results of this study indicate that LPMK has carried out its role well as a partner of the village government in preparing and overseeing development programs. However, there are still obstacles such as limited operational budgets, lack of support for work support facilities and the influence of formal and customary social norms that sometimes limit LPMK's room for movement.

Keywords : Role, Community Empowerment Institutions, Villages, Development

PENDAHULUAN

Pembangunan pada tingkat kelurahan merupakan bagian penting dari proses pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Kelurahan sebagai unsur pemerintah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat memiliki posisi strategis dalam tata kelola pemerintahan. Kelurahan berperan penting dalam menyerap aspirasi warga, menyelenggarakan pelayanan publik yang responsif, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan di tingkat lokal. Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan, keterlibatan masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan menjadi suatu keharusan. Salah satu lembaga yang memiliki peran strategis dalam proses tersebut adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) adalah lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat. Lembaga ini berfungsi sebagai wadah untuk menjangkau serta menyampaikan aspirasi warga, sekaligus berperan dalam mendorong peningkatan kapasitas masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan dalam pembangunan di tingkat kelurahan. Keberadaan LPMK diatur secara legal dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memperkuat posisi dan fungsi lembaga ini sebagai mitra kerja pemerintah kelurahan. Salah satu landasan hukum utama yang mengatur tentang LPMK adalah Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, yang dalam implementasinya di wilayah kelurahan menyesuaikan dengan peraturan daerah masing-masing.

Di Kelurahan Limbukan, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, LPMK telah menjalankan berbagai kegiatan pembangunan baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Kegiatan tersebut dirancang melalui musyawarah rencana pembangunan kelurahan (musrenbangkel). Berikut adalah contoh beberapa kegiatan yang melibatkan peran LPMK di Kelurahan Limbukan:

Tabel 1.
Kegiatan Pembangunan di Kelurahan Limbukan

No	Jenis Kegiatan	Kategori
1.	Pembangunan drainase	Fisik
2.	Pembangunan jalam	Fisik
3.	Posyandu remaja	Non fisik
4.	Pembinaan kelompok yasin	Non fisik
5.	Pencegahan stunting	Non fisik

Sumber: Kelurahan Limbuka

Kegiatan-kegiatan yang difasilitasi oleh LPMK tersebut menunjukkan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) tidak hanya sekedar pelengkap dalam struktur organisasi pemerintah kelurahan, melainkan memiliki peran strategis yang nyata dalam mendorong terciptanya pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. LPMK juga memiliki peran aktif sebagai fasilitator dalam menyusun usulan program dan kegiatan pembangunan melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) kelurahan dan menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Peran aktif LPMK ini tidak terlepas dari dinamika sosial masyarakat di kelurahan, hubungan dengan pemangku kepentingan lokal seperti RT/RW, tokoh adat, tokoh agama, serta dukungan dari perangkat kelurahan. Ketika peran tersebut berjalan secara sinergis, maka LPMK

mampu mendorong percepatan pembangunan yang inklusif, serta membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah setempat.

Namun, dalam realisasi tugas dan fungsinya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kelurahan Limbukan masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi perannya dalam pembangunan. Salah satu kendala utama yang sering muncul adalah keterbatasan anggaran operasional, kondisi ini menyebabkan beberapa program yang telah di rancang tidak dapat direalisasikan sepenuhnya atau terhambat dalam pelaksanaannya. Selain itu, minimnya fasilitas penunjang kerja seperti alat dokumentasi, perlengkapan administrasi juga menjadi penghambat tersendiri dalam menjalankan kegiatan. Di sisi lain, dukungan dari masyarakat maupun tokoh adat belum sepenuhnya optimal. Berangkat dari berbagai permasalahan tersebut, maka penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan- hambatan yang dihadapi oleh LPMK serta mencari solusi atau strategi penguatan yang dapat di terapkan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan gambaran empiris mengenai kondisi LPMK saat ini, tetapi juga dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan penguatan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam peran lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam pembangunan di kelurahan Limbukan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Limbukan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh. Teknik penentuan informan menggunakan metode purposive sampling, yaitu informan yang dianggap mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti. Informan tersebut meliputi Ketua LPMK Limbukan, Lurah, Seksi Pembangunan, Ekonomi, Koperasi, dan Lingkungan Hidup, Seksi Kesejahteraan Masyarakat dan Humas, dan Masyarakat RT/RW setempat. Guna memperoleh data yang akurat, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan informan, observasi, kemudian mengumpulkan data dengan analisis dokumen-dokumen yang relevan, foto kegiatan, dan dokumen administrasi LPMK. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkapkan dinamika sosial pandangan masyarakat, serta hambatan yang di hadapi oleh LPMK dalam menjalankan fungsinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil peran lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam pembangunan di kelurahan Limbukan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:

a. Norma

Norma merupakan sebuah perangkat yang dibuat untuk mengatur hubungan di dalam suatu masyarakat agar dapat berjalan dengan sebagai mana yang diharapkan. Norma juga diartikan sebagai peraturan atau petunjuk hidup yang memberikan perbuatan yang mana boleh dijalankan dan perbuatan mana yang harus dihindari. Pada dasarnya peraturan merupakan pedoman atau landasan agar manusia dapat hidup secara tertib dan teratur.

Bedasarkan hasil penelitian dan observasi dari indikator norma dapat dilihat bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kelurahan (LPMK) di Limbukan pada

umumnya telah menunjukkan kepatuhan terhadap norma atau aturan yang formal yang berlaku dalam proses pembangunan. LPMK juga konsisten dalam menjaga nilai-nilai lokal seperti gotong royong, musyawarah dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam menjalankan perannya LPMK di Kelurahan Limbukan masih terkendala oleh norma-norma sosial dan budaya. Dalam masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai adat, terkadang kebijakan atau program yang diusulkan oleh LPMK tidak sepenuhnya diterima apabila tidak sesuai dengan norma-norma lokal. Meskipun LPMK telah berupaya untuk mengakomodasikan nilai-nilai budaya dalam setiap perencanaan pembangunan, hal ini menunjukkan bahwa peran LPMK dalam menyesuaikan program pembangunan dengan norma yang berlaku masih perlu ditingkatkan.

b. Individu

Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Perilaku individu merupakan suatu perilaku seseorang dalam melakukan sesuatu atau cara bertindak terhadap suatu kegiatan dengan menggunakan keterampilan atau talenta.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi dari indikator individu dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Limbukan secara umum telah menunjukkan komitmen rasa tanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya dalam pembangunan. LPMK memiliki semangat dan motivasi untuk berperan aktif dalam menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah kelurahan, terutama dalam menyampaikan aspirasi masyarakat.

c. Individu Dalam Struktur Sosial

Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang memiliki peranan penting bagi struktur sosial masyarakat. Struktur sosial adalah hubungan timbal balik antara posisi-posisi serta peran yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang ada di dalam struktur sosial tersebut. LPMK sebagai lembaga seharusnya menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Jika hubungan sosial antara LPMK dan masyarakat belum erat, maka potensi peran LPMK menjadi terbatas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa individu dalam struktur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) menempati posisi yang strategis dengan tatanan sosial masyarakat, terutama dalam hal menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah dalam konteks pembangunan. Keberadaan mereka dalam struktur sosial memberikan legitimasi terhadap peran yang dijalankan LPMK sebagai lembaga representatif masyarakat, keberadaan LPMK dianggap sebagai perpanjangan tangan dari Masyarakat, khususnya dalam forum-forum musyawarah. Namun masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui secara mendalam mengenai tugas dan fungsi LPMK.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa kendala atau hambatan dalam peran lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam pembangunan di kelurahan Limbukan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh, sebagai berikut:

1. Kurangnya dukungan dari masyarakat dan tokoh adat, merupakan salah satu faktor penghambat dalam melaksanakan pembangunan di kelurahan. Keberadaan norma adat yang masih kuat terutama yang berkaitan dengan kepemilikan tanah ulayat dan tanah adat, dalam pembangunan fisik yang difasilitasi oleh LPMK seperti

pembangunan jalan dan drainasi sering mendapat kendala tidak memperoleh izin pembebasan lahan dari pemilik tanah adat.

2. Keterbatasan anggaran operasional merupakan salah satu hambatan utama yang dihadapi oleh LPMK. Anggaran yang terbatas menghambat pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat. Akibatnya, LPMK kesulitan untuk menjalankan fungsinya secara maksimal, terutama dalam menjaring aspirasi dan menindaklanjuti kebutuhan masyarakat.
3. Kurangnya fasilitas saran dan pendukung yang memadai menjadi faktor penting dalam menunjang kinerja LPMK. Namun, di Kelurahan Limbukan, fasilitas alat komunikasi, dan perlengkapan dokumentasi masih minim. Hal ini berdampak pada efektivitas koordinasi antaranggota serta menyulitkan dokumentasi kegiatan dan administrasi kelembagaan.

SIMPULAN

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan memiliki peran penting dalam proses pembangunan di kelurahan, baik pembangunan fisik maupun nonfisik. LPMK berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam menyampaikan aspirasi dan usulan program prioritas pembangunan. Namun demikian, dalam pelaksanaan perannya LPMK masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan anggaran operasional, minimnya fasilitas penunjang kerja bagi LPMK, serta pengaruh norma sosial dan adat yang dalam beberapa kasus membatasi ruang gerak LPMK.

Secara keseluruhan, masyarakat kelurahan Limbukan telah memberikan dukungan penuh dan respon positif terhadap program-program pembangunan yang di buat oleh LPMK, baik itu berupa pembangunan fisik misalnya pembangunan jalan dan drainase, maupun non fisik misalnya pelatihan pemberdayaan ekonomi dan kegiatan sosial. Masyarakat juga menilai bahwa LPMK turut berperan dalam menyalurkan aspirasi mereka kepada pihak kelurahan. Meskipun demikian, peran tersebut masih belum berjalan secara maksimal, oleh karena itu dibutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan dukungan anggaran guna mendorong pembangunan kelurahan yang partisipatif, efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, D. (2016). Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah. *Jurnal Hukum Positum*, Vol.1, No..
- Digdowiseiso, K. (2019). Teori Pembangunan. In Universitas Terbuka. CV. Bintang Semesta Media. <http://repository.ut.ac.id/4601/>
- Brigette Lantaeda, S., Lengkong, F. D. J., & Ruru, J. M. (2002). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 04(048), 243.
- Margayaningsih, D. I. (2018). Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa. *Jurnal Publiciana*, 11(1), 72–88.
- Sugiyono. (n.d.-a). Memahami penelitian kualitatif. Bandung : Alfabeta, 2005.
- Tiwa, J. L., Gosal, R., & Kimbal, A. (2017). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Paaldua Kecamatan Paal Dua Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/16649>
- Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Desa adat.